



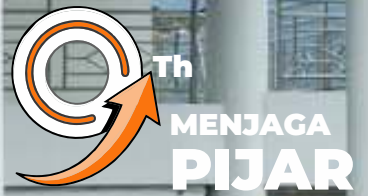
EDISI RABU 23 SEPTEMBER 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY



Banjir Bandang Lumpuhkan Solok

Banjir bandang menerjang Kabupaten Solok, Sumatra Barat, pada Senin (21/9/2026) sekitar pukul 20.00 WIB setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu (19/9). Bencana ini berdampak pada Kompleks Perkantoran Bupati Solok dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Tim gabungan BPBD, TNI, Polri, pemadam kebakaran, dan masyarakat hingga Selasa (22/9) dikerahkan untuk mengevakuasi warga, menyisir lokasi terdampak, serta membersihkan material banjir. Baca berita lengkap halaman 3. (ist.rtr)

LAHAN DIBATASI, BATAS BELUM PASTI

UU Reformasi Agraria Ngebut Disahkan, 596 Masalah Dibahas dalam 5 Hari

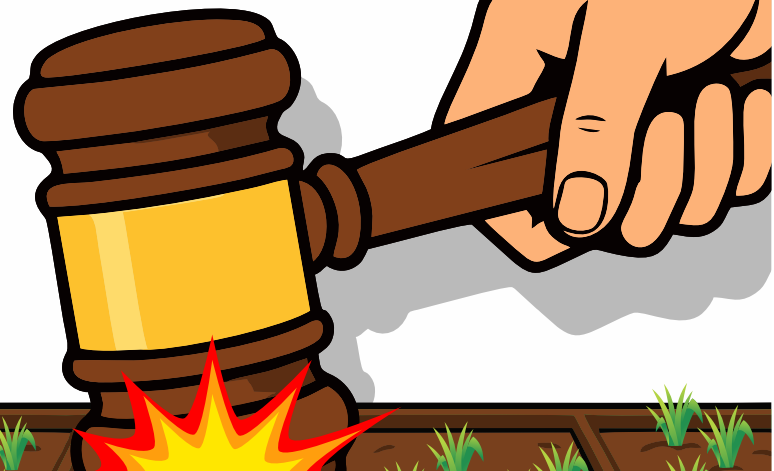
Palu DPR diketukkan. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria resmi disahkan menjadi undang-undang pada Selasa (22/6/2026). Regulasi yang digadang-gadang menjadi payung baru penataan agraria itu lahir setelah pembahasan tingkat I yang berlangsung maraton 5 hari pada 17-21 September. Diskusi sedikitnya 596 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pun selesai. Di balik pengesahan tersebut, satu bagian penting belum memiliki angka konkret yaitu batas minimum dan maksimum penguasaan serta kepemilikan tanah. UU memang mengamankan adanya penataan dan pengendalian batas penguasaan tanah. Namun, besaran batasnya belum ditentukan dalam UU yang baru disahkan. Pemerintah akan mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah (PP). BACA HAL 11...

8 PP yang akan diselesaikan pemerintah:

1. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring & evaluasi Reforma Agraria.
2. Penentuan lokasi prioritas Reforma Agraria.
3. Pemindahan status aset BMN, BMD, BUMN, dan BUMD.
4. Penyelesaian konflik agraria.
5. Kepemilikan bersama atas hak milik, termasuk pendaftaran, pengelolaan, pemanfaatan, dan pewarisan.
6. Penataan, pengendalian, dan pembatasan tanah.
7. Batas minimum & maksimum penguasaan serta kepemilikan tanah.
8. Partisipasi masyarakat.

5 Perpres yang juga disiapkan:

1. Peta jalan Reforma Agraria.
2. Tugas, fungsi, wewenang & struktur lembaga penyelenggara Reforma Agraria.
3. Pembentukan Dewan Pengawas.
4. Objek Reforma Agraria berupa sumber agraria lainnya.
5. Peringatan tertulis, pencabutan, dan pemberian hak kepada pihak lain.

**TOK!****02**GOVERNMENTTODAY
Prabowo Perintahkan Bea Cukai Perketat
Perbatasan, Balpres Jadi Sorotan**05**NUSANTARA
Kala Separuh Jalan Kabupaten Rusak,
Bupati Boltara Terima Rp11,14 M**10**LISTSTYLE
Catat Cara Atasi Ketiak Gelap Eksfoliasi Penting

PRABOWO PERINTAHKAN BEA CUKAI PERKETAT PERBATASAN, BALPRES JADI SOROTAN

Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir diperketat untuk mencegah masuknya barang ilegal.

Djaka mengatakan instruksi tersebut berkaitan dengan upaya menghalau penyelundupan, termasuk narkoba, balpres (istilah untuk pakaian atau baju bekas impor yang dikemas dalam bentuk karung atau bal besar dan barang lain yang dilarang. "Dipanggil disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Itu saja," kata Djaka kepada wartawan se usai bertemu Prabowo.

Menurut Djaka, penguatan pengawasan akan dilakukan dengan menambah peralatan serta memperketat satuan tugas yang menangani pencegahan dan penindakan barang kena cukai ilegal. "Ya strateginya ya pasti tambah, tambah ini apa namanya, tambah peralatan, kemudian Satgas diperketat, itu saja," ujarnya.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian ialah perairan Selat Malaka. Bea Cukai, kata Djaka, memiliki pangkalan sarana operasi di sepanjang kawasan tersebut. Ia menyebut terdapat hampir 100 kapal yang dapat diberdayakan untuk mendukung pengawasan. Namun, pengerahan seluruh sarana itu tetap bergantung pada ketersediaan anggaran.

"Ya di sepanjang laut Selat Malaka kan, kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir seratus lebih kapal ya, nanti kita akan, akan berdayakan semua. Tapi semuanya itu tergantung anggaran yang ada, ya," tutur Djaka.

Ia mengatakan tambahan anggaran untuk Bea Cukai telah disetujui dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPR. "Ya kita sudah dikasih penambahan anggaran kemarin pada saat rapat di badan anggaran," katanya.

Instruksi Prabowo datang pada hari yang sama ketika pemerintah menyoroti masuknya pakaian jadi melalui impor kiloan dan balpres. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan praktik tersebut dinilai mengganggu produsen garmen dalam



Konferensi pers Penindakan Impor Ilegal Beras, Garam, dan Balpres di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Selasa (22/9/2026). (ist)

negeri dan meminta Bea Cukai segera melakukan penertiban.

"Yang kedua, khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garment. Di mana gangguan-gangguan melalui import kiluan, ataupun import yang balpres. Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan," kata Airlangga di Istana Negara, Selasa.

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat mengenai pengembangan industri tekstil dan industri sepatu. Pemerintah juga mengevaluasi kemudahan masuknya bahan baku bagi industri tekstil, termasuk bahan berbasis kulit yang membutuhkan kemudahan dalam proses sertifikasi halal.

Data yang disampaikan Airlangga menunjukkan industri tekstil dan produk tekstil merupakan sektor padat karya. Industri tersebut menyumbang sekitar 0,97 persen terhadap PDB dan menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja. Pertumbuhan industri TPT tercatat 5,6 persen, sementara industri barang kulit dan alas kaki tumbuh 8,25 persen. Utilisasi

pabrik tekstil saat ini sekitar 75 persen.

Untuk perdagangan, Indonesia masih menjadi net importer pada industri tekstil dari sektor hulu hingga tengah. Impor bahan baku tekstil tahun lalu mencapai sekitar 8,4 miliar dolar AS, sedangkan eksportnya 3,1 miliar dolar AS. Sebaliknya, untuk produk garmen, ekspor mencapai sekitar 8,7 miliar dolar AS dan impor sekitar 690 juta dolar AS.

"Jadi ada dua, dari segi industri hulu sampai tengah, kita net importer. Tetapi kalau dari segi garment, kita net exporter," kata Airlangga.

Sita 1.435 Balpres

Pengetatan pengawasan juga berlangsung ketika Bea Cukai baru saja mengungkap sejumlah kasus impor ilegal. Sepanjang Agustus hingga pertengahan September 2026, DJBC menindak empat kasus dengan total nilai barang sekitar Rp27,34 miliar.

Penindakan tersebut mencakup 30 kontainer berisi beras dan garam serta 1.435 bale pakaian impor yang diduga merupakan pakaian bekas. Lokasinya tersebar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kawasan berikat di Bogor, perairan Gosong Bunga-Bunga di Selat Malaka, dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Kasus di Surabaya bermula pada 19 Agustus 2026. Sebanyak 15 kontainer yang diberitahukan berisi ammonium chloride asal India dengan berat 412,5 ton ternyata berdasarkan pemeriksaan fisik dan laboratorium

berisi 202.450 kilogram beras dan 211.000 kilogram barang lainnya. Nilai ketidaksesuaian tersebut mencapai sekitar Rp7,85 miliar.

Penindakan berikutnya dilakukan di Bogor pada 7 September 2026. Sebanyak 15 kontainer yang dilaporkan berisi bahan kimia untuk penyamakan kulit ternyata memuat sekitar 194.900 kilogram beras dan 225.400 kilogram butiran putih yang diduga garam. Nilainya diperkirakan Rp8 miliar.

Untuk balpres, Bea Cukai menindak 430 bale pakaian bekas di perairan Gosong Bunga-Bunga, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Nilai barang bersama empat koli suku cadang kendaraan bermotor diperkirakan Rp3,4 miliar. Penindakan lainnya menasar sembilan kontainer berisi sekitar 1.005 bale pakaian yang diduga bekas dengan nilai sekitar Rp8,04 miliar.

"Dari hasil pemeriksaan, Bea Cukai menemukan adanya indikasi misdeklarasi atau pemberitahuan barang yang tidak benar," kata Djaka.

Ia mengatakan seluruh barang hasil penindakan telah diamankan untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Masuknya balpres bukan persoalan baru. Pada 2025, Kementerian Perdagangan mencatat 19.391 bal pakaian bekas hasil sitaan di Bandung, dengan 16.591 bal atau sekitar 85,56 persen di antaranya telah dimusnahkan. (gus, ini, kim, dya)



BANJIR BANDANG SOLOK, DPR KEMBALI SOROTI MITIGASI BENCANA

Lagi-lagi DPR meminta pemerintah memperkuat mitigasi dan antisipasi bencana di seluruh Indonesia. Hal ini mencuat setelah banjir bandang menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Hingga Selasa (22/9/2026) tim SAR masih mencari korban yang dilaporkan hilang dalam bencana yang terjadi pada Senin (21/9/2026) malam itu. Hingga berita dibuat, satu korban meninggal telah ditemukan. Ironisnya, risiko longsor dan banjir bandang di kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok sebenarnya sudah diketahui sejak awal kawasan Arosuka disiapkan sebagai pusat pemerintahan.



Area yang terdampak banjir bandang akibat hujan lebat di Solok, Provinsi Sumatra Barat, Selasa (22/9/2026). (ist.rtr)

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan penguatan mitigasi diperlukan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, termasuk akibat curah hujan tinggi yang terjadi di sejumlah wilayah.

"Kami meminta kepada semua stakeholder untuk bisa betul-betul mengantisipasi dan memitigasi semua hal yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di Solok saja," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menurut Puan, antisipasi perlu diperkuat karena bencana dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk curah hujan tinggi dan kondisi gunung api di Indonesia.

"Terkait dengan ke depannya bencana-bencana yang sekarang ini terkait dengan curah hujan yang cukup keras ataupun sangat tinggi, juga efektivitas dari semua gunung yang ada di Indonesia dan hal-hal lain," ujarnya.

Puan mengatakan DPR sebelumnya telah beberapa kali mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai pentingnya mitigasi. Tim kebencanaan DPR juga telah menyampaikan perlunya langkah antisipasi terhadap potensi bencana di berbagai daerah.

"Bahkan tim dari kami, tim

bencana juga sudah menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi-mitigasi, jadi memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis," kata Puan.

Ia berharap proses pencarian dan evakuasi korban di Solok segera selesai. Puan juga meminta evaluasi dan mitigasi dilakukan lebih efektif setelah penanganan darurat berlangsung.

"Jadi, terkait dengan bencana yang banjir bandang di Solok, kami berharap saat ini kan masih dalam proses pencarian atau evakuasi, semoga tidak ada korban yang ada, namun ke depannya harus lebih mengantisipasi dan mitigasi yang lebih efektif," ujarnya.

Selain Puan, anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi meminta keselamatan warga menjadi prioritas dalam penanganan banjir bandang Solok.

Athari mengatakan penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada pembersihan material dan pemulihan infrastruktur. Kondisi warga yang berada di kawasan terdampak harus menjadi perhatian pertama.

"Jangan sampai kita terlambat bertindak ketika warga masih menghadapi ancaman. Evakuasi, pertolongan, dan pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas bersama," kata Athari di Jakarta, Selasa.

Ia meminta seluruh unsur terkait memastikan tidak ada warga yang tertinggal, terutama anak-anak, lansia, perempuan, dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

"Infrastruktur bisa kita bangun kembali, kantor bisa diperbaiki, jalan bisa dibersihkan. Tetapi keselamatan dan nyawa manusia tidak bisa digantikan," kata legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat I tersebut.

Athari juga meminta pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan unsur terkait memperkuat koordinasi serta melakukan penyisiran terhadap wilayah terdampak.

Ia mengingatkan kondisi air yang mulai surut tidak otomatis berarti ancaman telah berakhir. Potensi banjir bandang maupun longsor susulan

tetap perlu diantisipasi.

"Masyarakat yang berada di titik rawan harus mendapatkan informasi yang jelas dan diarahkan ke tempat yang benar-benar aman," katanya.

Setelah fase evakuasi selesai, Athari meminta pemerintah memastikan pemulihan rumah, fasilitas umum, akses jalan, hingga kehidupan masyarakat terdampak.

"Setelah fase evakuasi selesai, kita harus memastikan kebutuhan warga, pemulihan rumah, fasilitas umum, akses jalan, hingga pemulihan kehidupan masyarakat juga mendapat perhatian," katanya.

Menurut Athari, kejadian tersebut menjadi momentum memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, khususnya di Sumatera Barat yang memiliki kerentanan terhadap banjir bandang dan longsor.

"Mitigasi harus diperkuat, titik-titik rawan harus dipetakan, sistem peringatan dini harus berjalan, dan masyarakat harus mendapatkan edukasi yang memadai," katanya.

Desakan DPR tersebut disampaikan ketika operasi pencarian korban banjir bandang masih berlangsung.

Tim SAR gabungan bersama masyarakat menemukan satu korban di aliran Sungai Koto Gaek yang berbatasan dengan daerah Jawi-jawi, Kabupaten Solok, pada Selasa sekitar pukul 13.30 WIB.

Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengatakan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban langsung dievakuasi, tetapi identitasnya belum dapat dipastikan.

"Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan beserta masyarakat di aliran sungai dalam keadaan meninggal dunia," kata Abdul Malik di Padang. (gus,ist,kcm/dya)



GIBRAN DIGUGAT DI MK, PRABOWO DIMINTA AJUKAN 2 CAWAPRES

Gugatan terhadap keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden 2024-2029 memasuki babak persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu konsekuensi yang diminta para pemohon apabila gugatan dikabulkan ialah Presiden Prabowo Subianto harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).



Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan aturan baru terkait sidang penanganan permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan pada 2026. (ANTARA)

Permintaan itu tercantum dalam petitum perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Para pemohon meminta MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden paling lambat 60 hari setelah putusan MK dibacakan.

"Memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan oleh presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak putusan ini dibacakan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945," demikian bunyi petitum tersebut dikutip Selasa (22/9/2026).

Gugatan tidak diajukan untuk mempersoalkan hasil penghitungan suara Pilpres 2024, melainkan syarat pencalonan Gibran, khususnya persyaratan pendidikan. Para pemohon mendalilkan Gibran tidak memenuhi ketentuan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, mengatakan persoalan yang mereka soroti bukan sekadar

kelengkapan administrasi. Menurut dia, terdapat dugaan cacat pada pemenuhan syarat pendidikan Gibran. "Para Pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga manipulatif," kata Bambang.

Para pemohon mempersoalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi salah satu dasar pencalonan Gibran. Mereka menyatakan surat tersebut tidak disertai dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan telah tamat pendidikan tingkat menengah. Bambang menekankan kata "tamat" dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu sebagai bagian penting dari perkara tersebut.

"Sementara menunjukkan kelulusan bukti perguruan tinggi tidak dengan sendirinya bermakna telah memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat," ujar Bambang.

Ia juga mengatakan aturan KPU sejak Pilpres 2009 hingga 2019 tidak mengenal pengecualian dokumen untuk membuktikan syarat pendidikan minimal bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Perkara Sudah Lewat Tenggat

Persoalan lain dalam perkara ini ialah waktu pengajuan. Permohonan PHPU tersebut baru diajukan pada 10 September 2026, hampir dua tahun

setelah Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik. Padahal, sengketa hasil Pilpres secara normal memiliki tenggat pengajuan yang jauh lebih pendek.

MK sendiri mencatat para pemohon menyadari perkara tersebut diajukan jauh melampaui tenggat. Namun, mereka meminta MK menjawab konsekuensi konstitusional apabila kemudian terbukti syarat pencalonan wakil presiden tidak terpenuhi sejak awal.

Untuk menangani perkara yang diajukan di luar jadwal normal tersebut, MK menerbitkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026 mengenai tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan pada 2026. Aturan itu ditandatangani Ketua MK Suhartoyo pada 16 September 2026.

Juru Bicara sekaligus Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan aturan baru diperlukan agar perkara dapat diproses sesuai tahapan hukum acara. PMK tersebut, kata dia, tidak otomatis berarti MK telah menerima seluruh dalil pemohon.

Dalam Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2026 ditegaskan bahwa penetapan tahapan dan jadwal bersifat prosedural dan normatif. Penetapan itu bukan penilaian MK mengenai kewenangan, kedudukan hukum pemohon, tenggat waktu, objek

POIN GUGATAN GIBRAN DI MK

- **Perkara:**
01/PHPU.PRES-XXIV/2026
- **Pemohon:**
KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.
- **Syarat pendidikan dipersoalkan**
Pemohon menilai Gibran tidak memenuhi Pasal 169 huruf r UU Pemilu yang mensyaratkan capres-cawapres minimal tamat SMA/ sederajat.
- **Dokumen kelulusan dipertanyakan**
Pemohon menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan tingkat menengah.
- **Surat keterangan**
penyetaraan disengketakan Surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dinilai tidak didukung ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti tamat pendidikan.
- **Diduga bukan**
sekadar cacat administratif Kuasa hukum Bambang Widjojanto menyebut ada indikasi dan bukti awal bahwa persoalan syarat pendidikan bersifat "manipulatif".
- **Pencalonan diminta**
dinyatakan cacat hukum Pemohon meminta MK menyatakan penetapan Gibran sebagai cawapres 2024 cacat hukum sejak semula dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- **Gibran diminta didiskualifikasi**
Pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran dari pencalonan Pilpres 2024.
- **Keputusan KPU diminta dibatalkan**
Pemohon meminta pembatalan keputusan KPU sepanjang menyangkut penetapan Gibran sebagai cawapres.
- **Pelantikan Gibran diminta dibatalkan**
Pemohon meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden oleh MPR.
- **MPR diminta memilih wapres baru**
Jika gugatan dikabulkan, pemohon meminta MPR menggelar sidang untuk memilih wapres dari dua nama yang diajukan Presiden.
- **Batas waktu 60 hari**
Pemilihan wapres baru diminta dilakukan paling lambat 60 hari sejak putusan MK dibacakan, merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.



permohonan, maupun pokok perkara. Penilaian atas hal-hal tersebut akan dipertimbangkan MK dalam putusan atau ketetapan. (tin,rls,jpn,ist/dya)

KALA SEPARUH JALAN KABUPATEN RUSAK, BUPATI BOLTARA TERIMA RP11,14 M

Kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut/Boltara) Sirajudin Lasena memperlihatkan ironi pengelolaan proyek infrastruktur di daerah. Saat hampir separuh jalan kabupaten dalam kondisi sedang hingga rusak berat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga proyek pemerintah justru menjadi sumber pungutan bagi kepala daerah.

HARTA KEKAYAAN SIRAJUDIN LASENA

LHKPN KPK periodik 2025

RP1.464.587.096

dilaporkan pada 29 Maret 2026

○ Tanah dan Bangunan

Rp 810.000.000

○ Alat Transportasi dan Mesin

Rp 326.000.000

○ Harta Bergerak Lainnya

Rp 202.500.000

○ Kas dan Setara Kas

Rp 126.087.096

○ Utang

Rp 260.171.046



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bolaang Mongondow Utara, Sirajudin Lasena, Selasa (22/9/2026) setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (21/9).ist

produksi daerah.

"Padahal, jalan di kabupaten tersebut bukan hanya untuk mobilitas penduduk, tetapi juga menghubungkan antara sentra produksi dengan pasar dan pusat pelayanan," ujarnya.

Ironi itu semakin kentara karena perkara yang menjerat Sirajudin berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ), termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Sehari setelah OTT, KPK mengungkap perkara tersebut berawal dari dugaan pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Bolmut.

Fee Proyek 10 Persen

KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10 persen dari nilai proyek PBJ di lingkungan Pemkab Bolmut. Dari persentase tersebut, 4 persen disebut diperuntukkan bagi Kepala Dinas PUPR Bolmut, sedangkan 1 persen untuk kelompok kerja (Pokja) PBJ.

Sirajudin juga diduga mengatur vendor yang akan memenangkan proyek. Pengaturan tersebut kemudian ditindaklanjuti bawahannya melalui proses lelang.

"Ploting dilakukan dengan cara menuliskan nama calon pemenang pada setiap proyek yang sudah di-list pada lembaran kertas HVS," kata Taufik.

Salah satu proyek yang disebut KPK ialah pembangunan jalan wilayah Sangkub IV dengan nilai sekitar Rp1,9 miliar. Vendor yang telah diarahkan untuk memenangkan proyek itu kemudian diminta menyerahkan fee.

"Atas permintaan Saudara SJL tersebut, maka pihak swasta dimaksud kemudian menyerahkan uang sebesar Rp130 juta atau sebagian dari fee 10

persen yang sudah ditentukan oleh bupati untuk salah satu paket proyek berupa pembangunan jalan wilayah Sangkub IV," ujar Taufik.

Uang Rp130 juta itu menjadi bagian dari barang bukti dalam OTT. KPK menyita total Rp200 juta dari tiga lokasi: Rp130 juta di sebuah kamar hotel di Jakarta, Rp50 juta dalam koper di rumah Sirajudin, serta Rp20 juta di rumah Kepala Dinas PUPR Bolmut.

Dugaan Gratifikasi Rp11,14 M

Selain dugaan pemerasan dalam proyek, KPK menduga Sirajudin menerima gratifikasi dengan total Rp11,14 miliar sepanjang 2023-2026.

Menurut Taufik, Rp350 juta di antaranya diduga berasal dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bolmut yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan. Sementara Rp10,79 miliar lainnya disebut berasal dari pihak-pihak lain.

"Total penerimaan tersebut diduga mencapai Rp11,14 miliar," kata Taufik.

KPK masih akan menelusuri sumber dan aliran uang Rp10,79 miliar tersebut. Dugaan penerimaan itu disebut berlangsung sejak Sirajudin menjadi penjabat bupati hingga ketika dia menjabat sebagai bupati definitif.

"Di mana pada tahun 2023-2024, SJL menjadi Pj Bupati Bolmut (Bolaang Mongondow Utara) dan tahun 2025-2026, saat SJL menjabat sebagai Bupati Bolmut periode 2025-2030 penerimaan-penerimaan ini tetap dilanjutkan oleh yang bersangkutan," ujar Taufik.

Sirajudin sebelumnya merupakan Pj Bupati Bolmut pada 2023-2024, sebelum menjabat sebagai bupati

periode 2025-2030. Penangkapan terhadapnya menjadi OTT ke-21 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

KPK kemudian menahan Sirajudin untuk 20 hari pertama sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Ia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kasus tersebut masih berada pada tahap penyidikan. KPK menyatakan penerimaan lain yang nilainya mencapai Rp10,79 miliar akan dialami lebih lanjut, termasuk sumber serta aliran dananya.

Di luar proses hukum, penindakan ini juga berimbas pada dukungan politik Sirajudin. PDIP menyatakan mencabut dukungan terhadap Sirajudin setelah KPK menetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, PDIP menjelaskan bahwa Sirajudin bukan kader partai, melainkan figur yang diusung partai dalam Pilkada 2024.

Setelah menjalani pemeriksaan oleh KPK, Sirajudin yang di OTT oleh KPK bersama 13 orang tersangka lainnya di 3 wilayah berbeda yakni Jakarta, Boltara dan Gorontalo, keluar gedung Merah Putih digiring menuju mobil tahanan dan telah mengenakan rompi orange dengan tangan diborgol.

Kepada wartawan Sirajudin dengan mengatupkan tangan memohon maaf kepada seluruh masyarakat Bolmong Utara dan memohon doa agar dirinya dapat fokus dalam menjalani proses hukum yang sementara dihadapi saat ini.

Selain Bupati Sirajudin, Kadis PUPR Bolmut juga di OTT KPK bersama sejumlah ASN serta pihak swasta.

Ditahun 2026, KPK berhasil melakukan 21 OTT dan meringkus 13 Kepala Daerah, ASN, Pejabat Pajak, Bea Cukai hingga aparat peradilan.

Adapun Kepala Daerah yang berhasil di OTT KPK yakni, Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, Muara Enim, Kuantan Singingi, Langkat, Sukoharjo, Lombok Barat, hingga Bupati Pemalang pada akhir Juli dan saat ini Bupati Boltara akhir September. (gus,ist,kum/dya)

KPK menetapkan Sirajudin sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 21 September 2026. Dalam operasi tersebut, 14 orang diamankan di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Sirajudin menjadi satu-satunya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab Bolmut 2024 menunjukkan 49,2 persen dari total 156,80 kilometer jalan kabupaten masih berada dalam kondisi sedang hingga rusak berat.

"Adapun data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab Bolmut tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 49,2 persen dari total 156,80 kilometer jalan raya Kabupaten di Bolmut masih dalam kondisi sedang hingga rusak berat," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026).

Menurut Taufik, persoalan jalan tersebut bukan sekadar menyangkut infrastruktur fisik. Jalan menjadi penghubung mobilitas masyarakat sekaligus jalur distribusi hasil

Pemkab Malang Usul Rp 10 M ke Pusat untuk Akses Kampung Nelayan Pujiharjo

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengusulkan anggaran sekitar Rp10 miliar kepada pemerintah pusat untuk meningkatkan akses jalan menuju Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo. Langkah tersebut agar ruas jalan dari kawasan Jalan Nasional Tirtoyudo menuju Pujiharjo hingga KNMP masuk dalam prioritas penanganan Kementerian.

"Untuk yang Pujiharjo, kami ajukan Rp10 miliar dulu. Yang penting masuk ke dalam prioritas kementerian dulu, supaya nanti tahun berikutnya bisa kita tambahkan," ujar Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaldi Kusuma, Selasa (22/9/2026).

Dijelaskannya, usulan peningkatan akses menuju Pujiharjo tidak mencakup seluruh bentang jalan. Penanganan akan dilakukan pada sejumlah titik yang dinilai membutuhkan peningkatan.

Ruas Tirtoyudo-Pujiharjo sebelumnya menjadi salah satu dari empat ruas jalan strategis yang diajukan Pemkab Malang untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Empat ruas

tersebut, yakni Kepanjen-Pagak, Druju-Sendangbiru, Donomulyo-Kalipare, serta akses menuju Kampung Nelayan Merah Putih di Pujiharjo.

Untuk ruas Kepanjen-Pagak, Pemkab Malang sebelumnya telah memperoleh kepastian bantuan sekitar Rp25 miliar. Sementara 3 ruas lainnya masih diupayakan memperoleh dukungan pemerintah pusat secara bertahap.

Dorongan peningkatan akses jalan tersebut sejalan dengan keberadaan KNMP Pujiharjo yang kini telah beroperasi. Pemerintah Kabupaten Malang menyebut kawasan tersebut tinggal menunggu agenda peresmian yang direncanakan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring mengatakan, pihaknya belum mengetahui waktu pelaksanaan peresmian tersebut. "Sekarang sudah operasional, tinggal kami menunggu peresmian oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Cuma kami belum tahu kapan akan diresmikan," kata Victor.

Desa Pujiharjo dipilih sebagai lokasi KNMP karena menjadi salah satu sentra produksi perikanan di Kabupaten Malang. Terdapat sekitar 540 nelayan dan kapal perikanan yang menjadi bagian dari aktivitas perikanan di wilayah tersebut.

Sejak dibangun pada 2025, KNMP Pujiharjo ditujukan untuk mendukung produktivitas sekaligus aktivitas ekonomi nelayan setempat. Sejumlah fasilitas di dalam kawasan KNMP juga mulai dimanfaatkan. Salah satunya cold storage yang telah digunakan untuk proses pembekuan ikan, meskipun saat ini belum memasuki musim ikan.

Fasilitas lain seperti pabrik es juga telah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan es bagi nelayan setelah melaut. Selain itu, tersedia fasilitas perbekalan nelayan, termasuk



Ilustrasi: Perbaikan ruas jalan di Kampung Nelayan Merah Putih Pujiharjo, Kabupaten Malang. (foto: Pemdes Pujiharjo)

penyaluran bantuan alat tangkap, penyewaan mesin kapal, serta cool box dari pemerintah pusat.

"Di sana juga ada bengkel nelayan untuk perbaikan mesin kapal nelayan. Itu juga sudah ada aktivitas. Lalu yang terakhir ada docking kapal, kemarin sudah ada pembuatan kapal baru hasil kerja antara Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Pujiharjo dengan pihak ketiga," jelas Victor. (Santi/Dya)

Gaji dan Tunjangan ASN Digeser ke TPP, Pemkot Malang Hapus Perhitungan Masa Kerja



Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, ditemui di Kantor DPRD Kota Malang, Selasa (22/9/2026). (Santi/Lentera)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyiapkan perubahan skema pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2027. Salah satunya menghapus masa kerja sebagai salah satu dasar perhitungan.

Dalam dokumen Laporan Hasil

Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2027, tercatat adanya pergeseran anggaran belanja Gaji dan Tunjangan ASN ke anggaran TPP pada sejumlah perangkat daerah (PD).

"Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN menjadi salah satu sumber yang diperhitungkan dalam menentukan besaran anggaran TPP. Memang belanja pegawai salah satunya juga nanti kami ambil besarnya TPP," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Selasa (22/9/2026).

Dijelaskannya, skema TPP yang

akan diterapkan nantinya tidak lagi menggunakan masa kerja sebagai salah satu pertimbangan. Pemkot Malang akan kembali menggunakan skenario yang sebelumnya diterapkan, dengan menitikberatkan pada kinerja ASN.

"Untuk TPP ini kami sudah menghilangkan terkait dengan masa kerja. Nanti kami kembali ke skenario yang lama tanpa melihat masa kerja. Tetap kami kembali ke kinerja," jelasnya.

Selain kinerja, faktor kedisiplinan dan sejumlah indikator lainnya juga akan menjadi pertimbangan dalam perhitungan TPP ASN. "Kemudian kami melihat terkait dengan bagaimana kedisiplinan, dan lain-lain itu untuk perhitungan TPP-nya," imbuh Wahyu.

Disebutkannya, skema baru tersebut telah mempertimbangkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemkot Malang juga disebut sudah

melakukan konsultasi sebelum menentukan skenario final pemberian TPP pada 2027.

"Untuk menentukan TPP ini kan kami harus ada konsultasi ke Kemendagri, ada arahan dari Kemendagri. Dari situ ada beberapa skenario yang akan kami jadikan pertimbangan untuk TPP," ujarnya.

Berdasarkan dokumen penyesuaian pagu anggaran dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang menjadi dasar penetapan KUA-PPAS 2027, terdapat sejumlah perubahan pada anggaran belanja pegawai dengan nominal lebih dari Rp1 miliar.

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tercatat pengurangan anggaran sebesar Rp3,271 miliar. Di dalamnya terdapat pergeseran anggaran belanja Gaji dan Tunjangan ASN ke anggaran TPP sebesar Rp2,987 miliar. Selain pergeseran tersebut, tercatat pula pengurangan anggaran belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp3,271 miliar. (Santi/Dya)

Sebuah pesawat Boeing 747-200 milik Iran Air diparkir di apron kargo Bandara Internasional Makau, China, 24 Agustus 2026.



AS BLOKIR MASKAPAI IRAN KE SELURUH DUNIA

Amerika Serikat (AS) mengancam seluruh maskapai Iran tak bisa beroperasi secara global mulai 23 September 2026. China menilai langkah itu sebagai sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional alias ilegal.

Amerika Serikat (AS) meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran dengan mengancam menghentikan operasional seluruh maskapai penerbangan Iran di dunia mulai Rabu, 23 September 2026. Ancaman itu tidak hanya menasar maskapai, tetapi juga perusahaan asing yang memberikan layanan kepada pesawat Iran.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan seluruh maskapai Iran akan menghadapi hambatan untuk beroperasi secara internasional akibat sanksi Washington. Pernyataan itu disampaikan Bessent, dikutip Selasa (22/9/2026).

"Pada 23 September, seluruh maskapai penerbangan Iran akan dihentikan operasionalnya di seluruh dunia," kata Bessent.

Bessent memperingatkan operator bandara dan perusahaan asing agar tidak memberikan layanan kepada maskapai Iran. Layanan yang dimaksud mencakup pengisian bahan bakar, fasilitas pendaratan, hingga penjualan tiket.

"Jika mereka mendarat, Anda tidak boleh menyediakan bahan bakar, tidak boleh memberikan layanan pendaratan, ataupun menjual tiket kepada mereka, atau Anda akan dikeluarkan dari sistem dolar," ujarnya.

Ancaman tersebut merupakan bagian dari kebijakan sanksi sekunder. Artinya, perusahaan atau institusi di negara lain yang tetap melayani maskapai Iran juga dapat terkena konsekuensi dari Washington.

Dengan posisi dolar AS dalam sistem keuangan global, ancaman tersebut dapat membuat operator asing menghadapi risiko kehilangan

akses terhadap layanan kliring berbasis dolar.

Reuters melaporkan Washington pada 8 September telah menjatuhkan 36 sanksi terkait Iran yang menasar sektor penerbangan dan sejumlah perusahaan lain. Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari upaya pemerintahan Presiden Donald Trump memperketat tekanan ekonomi terhadap Teheran.

Tekanan terhadap industri penerbangan Iran bukan hal baru. Financial Times melaporkan Mahan Air, salah satu maskapai utama Iran, telah menghentikan penerbangan internasional ke Istanbul, Ankara, dan Muscat setelah tekanan sanksi AS meningkat. Infrastruktur pendukung penerbangan Iran juga ikut terdampak, termasuk layanan darat dan agen penjualan di sejumlah negara.

China Sebut Ilegal

Beijing langsung merespons kebijakan Washington tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan Beijing menolak sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional ataupun mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"China secara konsisten menentang sanksi sepihak ilegal yang tidak memiliki dasar hukum internasional atau otorisasi dari Dewan Keamanan PBB," kata Guo dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (22/9/2026).

Pernyataan China itu muncul sehari setelah Bessent mengumumkan rencana untuk menghentikan operasional maskapai Iran secara global.

China selama ini menjadi salah satu mitra ekonomi penting Iran. Reuters sebelumnya melaporkan Iran menggunakan mekanisme perdagangan berbasis China untuk menyalurkan sekitar US\$2 miliar hingga US\$2,5 miliar hasil penjualan minyak dalam setahun terakhir, sebagai salah satu cara menghindari tekanan sanksi.

Namun, China belum secara resmi menyatakan akan mengabaikan seluruh sanksi AS terkait penerbangan Iran.

Pemerintah Iran juga belum memberikan tanggapan langsung terhadap pernyataan Bessent mengenai penghentian operasional maskapai Iran tersebut.

Kebijakan terhadap maskapai Iran muncul ketika konflik di Timur Tengah memasuki fase yang semakin kompleks. Washington tidak hanya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran, tetapi juga menghadapi perkembangan konflik yang melibatkan kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran.

Di Yaman, kelompok Houthi telah memperluas penguasaannya di sepanjang pesisir Laut Merah dan mendekati kawasan strategis di sekitar Selat Bab al-Mandeb.

Presiden Yaman Rashad al-Alimi bahkan meminta bantuan kepada Trump dalam percakapan telepon pada Minggu (20/9/2026).

Namun, menurut sumber Yaman dan Barat yang dikutip Reuters, Trump tidak memberikan komitmen untuk mengirim dukungan militer langsung menghadapi Houthi.

Houthi yang didukung Iran juga

IRAN MEMILIKI 23-24 MASKAPAI KOMERSIAL AKTIF

- Iran Air (Maskapai nasional/flag carrier resmi Iran)
- Mahan Air
- Zagros Airlines
- Caspian Airlines
- Iran Air Tours
- Iran Aseman Airlines
- ATA Airlines, Qeshm Air, dan Kish Air

• Rute Domestik:

Menghubungkan kota-kota utama di Iran seperti Teheran (Bandara Mehrabad dan Imam Khomeini), Mashhad, Shiraz, Isfahan, Tabriz, dan Pulau Kish.

• Rute Internasional:

Sebelum konflik dan sanksi terbaru, maskapai Iran melayani penerbangan ke sekitar 17 negara berbeda (terutama di Timur Tengah, Asia Tengah, dan sebagian kecil Eropa). Destinasi internasional utamanya meliputi Turki (Istanbul), Irak (Najaf, Baghdad), Oman (Muscat), Arab Saudi (Madinah), Qatar (Doha), dan Azerbaijan (Baku).



dilaporkan bergerak menguasai dataran tinggi strategis untuk memutus hubungan antara wilayah pesisir Laut Merah dan pasukan Yaman yang didukung Arab Saudi. Perkembangan tersebut terjadi setelah kelompok itu merebut sejumlah wilayah pesisir strategis.

Situasi tersebut berpengaruh terhadap jalur perdagangan dan energi dunia. Bab al-Mandeb merupakan salah satu jalur pelayaran penting yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.

Ketegangan juga berdampak pada pasar energi. Reuters mencatat harga minyak Brent sempat turun ke US\$100,34 per barel pada 21 September setelah muncul harapan mengenai perkembangan diplomatik AS-Iran serta pemulihan sebagian ekspor minyak Arab Saudi.

Pada saat yang sama, pasar negara-negara Teluk masih mencermati perkembangan konflik Iran dan Houthi menjelang pertemuan tingkat tinggi di Majelis Umum PBB.

Dengan demikian, ancaman Washington terhadap maskapai Iran tidak berdiri sendiri. Kebijakan itu menjadi bagian dari rangkaian tekanan ekonomi AS terhadap Teheran, sementara konflik yang melibatkan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran terus meluas ke jalur penerbangan, pelayanan, dan energi. (gus,ist,rtr/dya)



SONTEK RITUAL 90 DETIK PRAMUGARI AGAR MENGINAP DI HOTEL AMAN

Banyak orang punya kebiasaan yang sama begitu tiba di hotel setelah perjalanan panjang: meletakkan koper, melepas sepatu, lalu langsung rebahan di kasur. Pramugari justru punya ritual berbeda. Sebelum membongkar koper atau beristirahat, mereka meluangkan waktu sekitar 90 detik untuk memeriksa kamar.

Kebiasaan ini dikenal sebagai "hotel room autopsy". Istilah tersebut digunakan CabinCrew24, platform informasi untuk awak kabin. Menurut laporan tersebut, sejumlah awak kabin terbiasa melakukan pemeriksaan singkat setiap kali tiba di kamar hotel karena mereka menghabiskan ratusan malam di berbagai hotel, dengan standar keamanan dan aturan keselamatannya yang berbeda-beda.

Pemeriksaan ini bukan berarti wisatawan harus mencurigai setiap kamar hotel. Tujuannya sederhana yaitu mengenali kondisi kamar, memastikan sistem keamanan berfungsi, dan mengetahui jalur keluar sebelum keadaan darurat terjadi.

Dimulai Memindai Kamar

Begitu masuk, langkah pertama adalah memeriksa seluruh ruangan untuk memastikan tidak ada orang lain di dalam kamar.

Dalam laporan Travel + Leisure, pintu kamar bahkan disarankan tetap terbuka atau ditahan selama pemeriksaan awal. Selain memastikan tidak ada orang lain, cara ini memberi kesempatan untuk keluar dengan cepat apabila ditemukan sesuatu yang

mencurigakan. Aura Martinez, pramugari asal New York yang telah bekerja selama 19 tahun, mengatakan pemeriksaan tersebut tidak perlu dilakukan secara berlebihan. "Saya hanya ingin mengenali ruangan dan memastikan semuanya terlihat sebagaimana mestinya," kata Martinez.

Setelah itu, pemeriksaan dilanjutkan ke bagian kamar yang tidak langsung terlihat. Kamar mandi, area shower, bathtub, lemari pakaian, hingga bagian belakang tirai menjadi beberapa titik yang diperiksa. Travel + Leisure menyebut bagian pemeriksaan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 15 detik.

Cari Tangga Darurat

Setelah memastikan kamar dalam kondisi normal, perhatian beralih pada hal yang sering dilewatkan tamu hotel adalah jalur evakuasi.

Wisatawan dianjurkan melihat denah evakuasi yang biasanya ditempel di bagian belakang pintu kamar. Dari sana, cari tahu posisi tangga darurat terdekat dan arah yang harus ditempuh dari kamar.

Brian Rooney, konsultan perjalanan sekaligus pendiri GetCruiseInfo.com, mengingatkan bahwa keadaan darurat bukan waktu yang tepat untuk baru mempelajari denah bangunan. "Dalam situasi darurat, itu bukan waktu yang tepat untuk baru mempelajari denah bangunan," kata Rooney. Martinez juga menyarankan tamu mengingat apakah dari kamar mereka harus bergerak ke kiri atau kanan dan memperkirakan

jarak menuju tangga darurat. Panduan resmi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga merekomendasikan wisatawan segera memeriksa rencana evakuasi ketika tiba di penginapan. Wisatawan diminta mengetahui pintu keluar darurat terdekat dan memahami rute evakuasi.

Cek Kunci, Pintu dan Jendela

Langkah berikutnya adalah memastikan sistem pengunci kamar berfungsi. Periksa pintu utama, deadbolt, pengait pengaman, serta jendela atau pintu balkon jika tersedia. Pastikan semuanya dapat ditutup dan dikunci dengan baik. Travel + Leisure menyebut pemeriksaan kunci ini merupakan salah satu bagian penting dari ritual 90 detik tersebut.

Departemen Luar Negeri AS juga memasukkan pemeriksaan kunci pintu dan jendela sebagai bagian dari daftar keselamatan penginapan. Pemeriksaan tersebut mencakup pintu kamar, pintu kamar mandi, hingga akses balkon atau patio jika ada.

Untuk wisatawan yang bepergian sendiri, pemeriksaan ini menjadi semakin relevan. Pemerintah Australia melalui Smartraveller juga menyarankan wisatawan memastikan kamar memiliki lubang intip dan sistem penguncian yang memadai, serta mengunci pintu selama berada di kamar.

Coba Telepon Kamar

Ponsel mungkin selalu berada di tangan, tetapi telepon yang tersedia di kamar hotel sebaiknya tidak langsung

dianggap sebagai fasilitas usang. Awak kabin menyarankan tamu memastikan telepon kamar dapat digunakan dan tersambung. Dalam keadaan tertentu, perangkat tersebut dapat menjadi alternatif untuk menghubungi resepsionis atau meminta bantuan apabila ponsel pribadi bermasalah.

Panduan Departemen Luar Negeri AS juga memasukkan pengecekan telepon kamar dalam daftar keselamatan penginapan. Selain itu, wisatawan dianjurkan memeriksa keberadaan alarm kebakaran, alat pemadam, dan detektor karbon monoksida jika tersedia.

Jangan Langsung Buka Pintu

Satu kebiasaan lain yang disarankan awak kabin adalah berhati-hati ketika seseorang mengetuk pintu kamar. Jika ada orang yang mengaku sebagai staf hotel, jangan langsung membuka pintu. Rooney menyarankan tamu menghubungi resepsionis terlebih dahulu untuk memastikan identitas orang tersebut.

Departemen Luar Negeri AS juga menyarankan wisatawan bertemu orang asing atau pengunjung baru di area publik seperti lobi, bukan langsung di kamar.

Nomor kamar juga sebaiknya tidak disebut keras-keras di area publik. CabinCrew24, sebagaimana dikutip Travel + Leisure, memasukkan hal tersebut sebagai salah satu kebiasaan keselamatan bagi tamu hotel. (far,ist/dya)

MacSync Intai Pengguna Mac, Password hingga Aset Kripto Bisa Dicuri



Pengguna komputer Mac perlu kembali memperhatikan keamanan perangkatnya. Peneliti Kaspersky menemukan varian terbaru malware MacSync, perangkat lunak berjenis infostealer yang dirancang untuk mencuri informasi sensitif, mulai dari kredensial hingga data aset kripto.

MacSync bukan malware baru. Kaspersky menyebut keluarga malware ini pertama kali muncul pada 2024-2025 sebagai varian dari AMOS stealer.

Namun, versi yang ditemukan pada September 2026 telah mengalami perubahan besar dan menggunakan rantai infeksi yang lebih kompleks. Dalam serangan terbaru, MacSync tidak hanya membawa infostealer. Malware tersebut juga

memasang backdoor yang dapat memberikan kemampuan akses jarak jauh kepada penyerang. Kaspersky menyebut kombinasi tersebut membuat ancaman ini lebih serius bagi pengguna macOS.

Menyamar sebagai Aplikasi

Serangan bermula ketika file berbahaya masuk ke perangkat korban. Salah satu cara yang digunakan adalah menyamarkan malware sebagai aplikasi yang terlihat normal, misalnya aplikasi berbagi dokumen atau dompet kripto.

Setelah file dijalankan, proses infeksi berlanjut melalui beberapa tahap. Dalam sejumlah kasus, salah satu komponen yang diunduh bahkan ditempatkan di dalam entri kalender iCloud publik dengan format .ics.

Teknik ini membuat rantai serangan tidak berhenti pada satu file. Malware dapat mengunduh dan memasang komponen lain setelah proses awal berhasil. Kaspersky menemukan dua komponen utama dalam versi terbaru MacSync, yakni infostealer untuk mengambil data korban dan backdoor yang memungkinkan penyerang melakukan sejumlah tindakan dari jarak jauh.

Incar Password dan Keychain

Target MacSync cukup luas. Malware dapat mengincar riwayat dan data peramban, cookie, kredensial yang tersimpan, informasi aplikasi Telegram, data dompet kripto, informasi login, hingga file Keychain macOS.

Keychain merupakan tempat macOS menyimpan berbagai informasi sensitif, termasuk kredensial dan kunci yang digunakan aplikasi maupun layanan tertentu.

Penelitian Microsoft terhadap infrastruktur MacSync juga menemukan kemampuan malware untuk memeriksa aplikasi dompet kripto seperti Ledger dan Trezor, mengakses atau mencoba membuka macOS Keychain, serta mengambil kredensial dan data sesi dari sejumlah browser.

MacSync juga dapat mencari file tertentu di perangkat, termasuk dokumen dan berkas yang berpotensi mengandung kredensial atau informasi sensitif. Salah satu bagian paling menarik dari serangan MacSync adalah penggunaan rekayasa sosial.

Malware dapat menyamar sebagai aplikasi yang sedang dipasang dan kemudian meminta

password administrator. Pengguna yang melihat permintaan tersebut mungkin menganggapnya sebagai bagian normal dari proses instalasi aplikasi di macOS. Setelah password dimasukkan, muncul pesan yang menyatakan aplikasi tersebut "rusak" atau damaged dan menyarankan pengguna memindahkannya ke tempat sampah.

Padahal, menurut Kaspersky, pesan tersebut berfungsi sebagai pengalih perhatian. Ketika korban mengira instalasi gagal, proses berbahaya telah berjalan di belakang layar. Karena itu, permintaan password administrator seharusnya tidak dianggap sebagai formalitas. Pengguna perlu memastikan aplikasi yang meminta akses tersebut memang berasal dari sumber yang dapat dipercaya.

Ada Backdoor

Bahaya MacSync tidak berhenti pada pencurian informasi. Kaspersky menemukan adanya backdoor yang menyamar sebagai aplikasi Finder. Komponen tersebut dapat memberikan kemampuan kepada penyerang untuk melakukan sejumlah tindakan pada perangkat yang telah terinfeksi.

Di antaranya adalah mengumpulkan informasi sistem dan file tertentu serta berpotensi menjalankan kode secara arbitrer.

Penyerang juga berpotensi menyebarkan add-on browser yang telah dimodifikasi.

Dalam skenario tertentu, komponen tersebut dapat digunakan untuk mengganti ekstensi dompet kripto dengan versi berbahaya. Kaspersky bahkan menemukan kemampuan untuk mengganti aplikasi Ledger asli dengan klon berbahaya. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Catat Cara Atasi Ketiak Gelap Eksfoliasi Penting

Warna kulit ketiak yang lebih gelap dibandingkan bagian tubuh lainnya merupakan hal yang cukup umum. Meski bukan selalu tanda adanya masalah kesehatan, kondisi ini terkadang membuat seseorang merasa kurang percaya diri, terutama ketika mengenakan pakaian tanpa lengan.

Kulit di area ketiak relatif sensitif dan setiap hari dapat mengalami berbagai bentuk gesekan. Mulai dari gesekan pakaian, mencukur atau mencabut bulu, hingga penggunaan deodoran dan antiperspirant. Kebiasaan perawatan yang terlalu agresif dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi berulang.

Ketika kulit mengalami peradangan atau iritasi, tubuh dapat meningkatkan produksi melanin sebagai bagian dari respons terhadap peradangan. Akibatnya, area yang sebelumnya mengalami iritasi dapat meninggalkan warna yang lebih gelap. Kondisi ini dikenal sebagai hiperpigmentasi pascainflamasi.

Selain iritasi, faktor genetik juga dapat memengaruhi warna kulit. Penumpukan sel kulit mati, gesekan, perubahan hormonal, hingga kondisi medis tertentu juga bisa menjadi penyebab kulit pada lipatan tubuh terlihat lebih gelap.

Karena itu, mengatasi ketiak gelap tidak cukup hanya dengan mencari produk yang disebut mampu mencerahkan kulit.

Kebiasaan yang menyebabkan iritasi juga perlu diperhatikan. Berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk membantu merawat kulit ketiak dan membuat warnanya terlihat lebih merata.

Pilih Produk Perawatan Lembut

Deodoran dan antiperspirant merupakan bagian dari rutinitas sehari-hari bagi banyak orang. Namun, tidak semua produk cocok untuk setiap jenis kulit.

Pada sebagian orang, bahan tertentu dalam produk perawatan ketiak dapat memicu iritasi. Pewangi, alkohol, atau bahan aktif tertentu dapat menimbulkan rasa perih, gatal, kemerahan, atau sensasi terbakar, terutama jika digunakan pada kulit yang baru saja dicukur.

Jika kulit ketiak mudah mengalami iritasi, pilih produk yang formulanya lebih sederhana dan ditujukan untuk kulit sensitif. Produk tanpa pewangi juga dapat dipertimbangkan apabila pewangi menjadi salah satu pemicu iritasi.

Jangan abaikan respons kulit setelah menggunakan produk baru. Jika muncul kemerahan, gatal, rasa terbakar, atau perih yang menetap, hentikan pemakaian dan pertimbangkan untuk menggantinya.

Satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah penggunaan produk setelah mencukur. Kulit yang baru dicukur dapat lebih rentan terhadap iritasi sehingga penggunaan produk dengan banyak bahan aktif secara langsung setelah bercukur sebaiknya dihindari jika menimbulkan rasa tidak nyaman.

Kurangi Kebiasaan Pemicu Iritasi

Mencukur atau mencabut bulu ketiak merupakan aktivitas yang umum dilakukan. Namun, jika dilakukan dengan teknik yang kurang tepat atau terlalu sering, aktivitas

tersebut dapat menyebabkan kulit mengalami mikrocedera dan peradangan. Pisau cukur yang tumpul, misalnya, dapat meningkatkan gesekan karena seseorang cenderung melewati area yang sama berulang kali untuk mendapatkan hasil yang lebih bersih.

Jika memilih mencukur, gunakan alat cukur yang bersih dan tajam. Basahi kulit terlebih dahulu dan gunakan gel atau krim cukur untuk membantu mengurangi gesekan. Cukur secara perlahan mengikuti arah pertumbuhan rambut. Hindari menekan pisau terlalu kuat atau berkali-kali melewati area yang sama.

Mencabut bulu menggunakan pinset atau metode pencabutan lainnya juga dapat menyebabkan iritasi pada sebagian orang. Jika setelah melakukan metode tersebut kulit sering mengalami kemerahan atau muncul bintil, berikan waktu bagi kulit untuk pulih.

Setelah mencukur, gunakan pelembap yang lembut agar kulit tidak terasa kering. Hindari langsung mengoleskan bahan yang terasa menyengat apabila kulit sedang sensitif. Selain mencukur, kebiasaan menggosok ketiak terlalu keras saat mandi juga sebaiknya dihindari. Kulit yang lebih bersih bukan berarti harus digosok sampai terasa perih.

Lakukan Eksfoliasi

Eksfoliasi sering dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi kulit kusam. Proses ini membantu mengangkat sel kulit mati dari permukaan kulit sehingga kulit dapat terlihat lebih halus dan bersih.

Namun, kulit ketiak tidak membutuhkan perlakuan yang agresif. Penggunaan scrub dengan butiran kasar atau menggosok kulit terlalu kuat justru dapat menyebabkan iritasi. Jika iritasi terjadi berulang, kondisi tersebut berpotensi membuat pigmentasi semakin terlihat.

Karena itu, jika ingin melakukan eksfoliasi, pilih produk dengan formula yang lebih lembut. Beberapa produk menggunakan bahan seperti AHA, PHA, atau lactic acid untuk membantu proses pengelupasan kulit secara kimiawi. Penggunaannya tetap harus mengikuti petunjuk pada kemasan. Tidak perlu melakukan eksfoliasi setiap hari hanya karena ingin mendapatkan hasil lebih cepat.

Gunakan Produk Pencerah

Setelah mengurangi sumber iritasi, langkah berikutnya adalah mempertimbangkan produk yang dapat membantu meratakan warna kulit.

Sejumlah bahan aktif sering digunakan dalam produk perawatan untuk membantu mengatasi hiperpigmentasi. Di antaranya niacinamide, vitamin C, alpha arbutin, ekstrak licorice, serta beberapa jenis asam seperti AHA dan lactic acid.

Niacinamide, misalnya, banyak digunakan dalam produk perawatan kulit untuk membantu memperbaiki tampilan warna kulit yang tidak merata. Sementara itu, bahan eksfoliasi seperti AHA dan lactic acid dapat membantu mengangkat sel kulit mati di permukaan. (far,ist/dya)

LAHAN DIBATASI, BATASdari Hal 1

Ada 596 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diserahkan pemerintah untuk dibahas bersama DPR. Dari jumlah itu, 164 DIM tetap, 54 mengalami perubahan redaksional, 57 berubah secara substansi, 295 dihapus, tiga berupa penambahan substansi, 20 berupa penambahan pasal, ayat, atau huruf, serta tiga mengalami reposisi sekaligus perubahan substansi atau redaksional.

Ketua Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Ahmad Iman Sukri mengatakan komposisi DIM menunjukkan kesamaan perhatian pemerintah dan DPR terhadap persoalan agraria.

"Dari komposisi DIM tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria," kata Iman dalam rapat pengambilalihan keputusan tingkat I di Baleg DPR.

Menurut Iman, pembahasan DIM dilakukan secara intensif dengan tetap membuka ruang masukan dari masyarakat. Ia juga mengatakan DPR telah melibatkan sedikitnya 55 pihak, mulai akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan hingga kementerian dan lembaga terkait.

"Agar RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria ini dapat benar-benar mendapatkan masukan yang bermakna dari publik sehingga Badan Legislasi mendapatkan abstraksi yang tepat untuk dituangkan menjadi norma dan materi muatan pada pasal-pasal," ujar Iman dalam laporan pembahasan di rapat paripurna.

Hasil akhirnya terdiri atas 14 bab dan 53 pasal. Materinya meliputi penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah, pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah, hingga penguatan kelembagaan reforma agraria.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kemudian meminta persetujuan fraksi-fraksi untuk mengesahkan RUU tersebut.

"Sekarang kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco dalam rapat paripurna.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Pengesahan itu dihadiri 139 delegasi masyarakat di tribun ruang sidang. Mereka antara lain berasal dari Konsorsium Pembaruan Agraria, Serikat Petani Indonesia, dan Federasi Serikat Perempuan Petani Indonesia. Setelah palu diketukkan,

mereka bersorak menyambut keputusan DPR.

PP Belum Disusun

Di balik pengesahan tersebut, satu bagian penting belum memiliki angka konkret yaitu batas minimum dan maksimum penguasaan serta kepemilikan tanah.

UU memang mengamankan adanya penataan dan pengendalian batas penguasaan tanah. Namun, besaran batasnya belum ditentukan dalam UU yang baru disahkan. Pemerintah akan mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pemerintah segera menyusun sejumlah aturan turunan sebagai konsekuensi pengesahan UU tersebut.

"Kami berkomitmen menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang menjadi amanat atau delegasi dari UU Reforma Agraria, salah satunya melalui penyusunan peraturan pemerintah," ujar Nusron dalam rapat paripurna, Selasa (22/9/2026).

PP tersebut tidak hanya mengatur batas penguasaan tanah. Pemerintah menyebut aturan turunannya juga akan mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reforma agraria, penentuan lokasi prioritas, pemindahan status barang milik negara dan daerah termasuk BUMN/BUMD, penyelesaian konflik agraria, serta partisipasi masyarakat.

Soal angka batas lahan, Nusron belum memberikan rincian. "Itu kan Rencana PP, bagian dari amanat dari UU Reforma Agraria yang baru saja disahkan. Soal formatnya bagaimana nanti tentunya akan dibahas dengan melibatkan stakeholder dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan," kata Nusron.

Ada Lembaga Baru

UU ini juga mengubah desain kelembagaan reforma agraria. Nama yang sebelumnya muncul sebagai Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) berubah menjadi Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA).

LPRA berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Lembaga ini memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penyelesaian konflik agraria. UU juga mengamankan pembentukan dewan pengawas untuk menjamin transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Nusron menjelaskan pembagian tugas antara ATR/BPN dan lembaga baru tersebut nantinya akan dibedakan berdasarkan karakter konflik.

"Yang menyangkut konflik

individu tetap di ATR/BPN karena sifatnya administrasi, tapi kalau menyangkut komunal, seperti rakyat dengan korporasi, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan BMN, mungkin ada di dalam badan tersebut nanti mediasinya," kata Nusron se usai rapat paripurna.

Dalam penjelasan lain, Nusron mengatakan ATR/BPN akan menyiapkan bahan dan proses administrasi sebelum dilimpahkan kepada lembaga tersebut.

"Ya, nanti menyiapkan bahan-bahan yang mentah, gitu kan, sama proses administrasinya kemudian dilimpahkan ke sana," kata Nusron.

Lokasi Prioritas dan Penerima

UU juga memperkenalkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Penentuan lokasi mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, konflik agraria, tanah terlantar, kemiskinan, tanah absentee, serta penguasaan tanah yang melebihi batas maksimum.

Kelompok yang diprioritaskan sebagai subjek reforma agraria mencakup petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin.

Mekanisme penyelesaian konflik diarahkan melalui musyawarah, pemulihan hubungan sosial, kepastian hukum dan pemulihan hak. Perlindungan juga diberikan kepada subjek reforma agraria, pendamping masyarakat, pelapor, saksi, serta pihak yang mempertahankan hak atas tanah.

Anggota Baleg DPR Muhammad Khozin menambahkan bahwa reforma agraria tidak berhenti pada redistribusi.

"Reforma agraria tidak cukup hanya membagikan dan memperbaiki tumpang tindih tanah. Kita juga harus mencegah mata rantai mafia tanah dan mencegah tanah kembali terkonsentrasi," kata Khozin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Nusron menyebut pengesahan UU tersebut sebagai tonggak penting pelaksanaan reforma agraria.

"RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria ini menjadi tonggak sejarah pelaksanaan reforma agraria di Indonesia sebagai mandat Konstitusi Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Nusron dalam rapat paripurna.

Ia juga mengatakan regulasi tersebut diharapkan memperkuat landasan hukum dan mempercepat penyelesaian persoalan agraria.

"RUU ini diharapkan dapat

**12 POIN PENTING
UU REFORMA AGRARIA**

- 1 BRAN diubah menjadi LPRA
- 2 LPRA bertanggung jawab kepada Presiden
- 3 Penetapan lokasi prioritas reforma agraria
- 4 Kriteria subjek & objek reforma agraria
- 5 Batas penguasaan/kepemilikan tanah
- 6 Pemindahan aset BMN, BMD, BUMN & BUMD
- 7 Penyelesaian konflik agraria
- 8 Pemulihan hak & redistribusi tanah
- 9 Perlindungan petani, pendamping, pelapor & saksi
- 10 Satu data reforma agraria
- 11 Dewan Pengawas & partisipasi masyarakat
- 12 Ketentuan pidana & peralihan



memperkuat landasan hukum penyelenggaraan reforma agraria secara nasional, mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria, serta mendorong terwujudnya pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber daya agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ucapnya.

Sebelum pengesahan, dalam pembahasan tingkat I, Nusron juga menyatakan:

"Tanah dan sumber daya agraria merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menaruh harapan besar agar penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dapat dilaksanakan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mampu mencegah dan menyelesaikan berbagai konflik agraria yang selama ini terjadi."

Namun, narasi pemerintah dan DPR mengenai partisipasi publik mendapat catatan dari masyarakat sipil.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria menilai proses legislasi berlangsung terlalu cepat. Penyusunan RUU berlangsung pada 1-7 September, ditetapkan sebagai usul DPR pada 8 September, pembahasan bersama pemerintah dimulai pada pertengahan September, dan DIM dibahas pada 17-21 September.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan masyarakat terdampak tidak memiliki waktu yang cukup untuk menelaah perubahan naskah. (wud,ant,kum,mag/dya)

DONY OSKARIA TEGASKAN MANAJER KOPDES BUKAN PEGAWAI BUMN

Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bukan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para manajer tersebut akan menjalani penugasan selama dua tahun untuk pembinaan koperasi, dengan biaya yang ditanggung pemerintah.

Dony menjelaskan, selama masa penugasan tersebut, para manajer akan ditempatkan di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara untuk KDKMP.

"Sebetulnya kan bukan pegawai BUMN ya. Nanti akan disampaikan mereka adalah karena ini kan penugasan selama dua tahun itu dibina dulu kan koperasi-koperasi ini. Nanti mereka akan ditempatkan dulu di bawah Agrinas Pangan," ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026).

Sementara untuk KNMP, pembinaan dilakukan melalui PT Agrinas Jaladri Nusantara. Namun, penempatan di bawah perusahaan tersebut tidak berarti para manajer otomatis menjadi pegawai BUMN.

"Karena ini kan penugasan selama dua tahun itu dibina dulu kan koperasi-koperasi ini," kata Dony. Ia menambahkan seluruh biaya yang muncul selama masa penugasan berasal dari pemerintah. "Tetapi seluruh biaya tentu biaya dari pemerintah. Jadi, pembinaannya akan dilakukan oleh Agrinas Pangan," ujarnya.

Klarifikasi Dony tersebut muncul sehari setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari memberikan keterangan berbeda. Pada Senin (21/9), Qodari menyatakan para manajer KDKMP akan berstatus sebagai pegawai BUMN pada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero),



sedangkan manajer KNMP ditempatkan sebagai pegawai PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). Keduanya disebut menggunakan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

"Para manajer berstatus sebagai Pegawai BUMN, bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan skema PKWT selama 2 tahun sebagai masa penguatan awal," ujar Qodari dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).

Perbedaan keterangan tersebut membuat kepastian mengenai status hubungan kerja menjadi salah satu hal yang dinantikan para calon manajer. Sebab, mereka tidak hanya menunggu lokasi penempatan, tetapi juga kepastian mengenai siapa pemberi kerja, bentuk kontrak, gaji, tunjangan, hingga hak dan kewajiban selama dua tahun penugasan.

Di sisi lain, sebagian calon manajer telah menunggu selama berbulan-bulan setelah menyelesaikan rangkaian seleksi dan pelatihan. Salah satunya Ahmad, 28 tahun, bukan nama sebenarnya. Ia bahkan sudah mengundurkan diri dari perusahaan swasta tempatnya bekerja sebelum mengikuti pelatihan calon manajer Kopdes.

"Saya resign sebelum masih pendidikan [pelatihan] calon manajer itu. Jadi sudah resign sejak saat itu," ujar Ahmad melalui sambungan telepon, Selasa

(22/9/2026).

Ahmad tertarik mengikuti program tersebut antara lain karena informasi mengenai penghasilan manajer yang disebut dapat mencapai belasan juta rupiah. Namun, ia mengatakan ketertarikannya bukan hanya soal penghasilan. Ia melihat Kopdes sebagai program yang dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil.

Mahsyar Taufiq, 30 tahun, mengalami situasi serupa. Lulusan S2 Universitas Hasanuddin asal Mamuju, Sulawesi Barat, itu meninggalkan pekerjaan sebagai konsultan bidang perikanan untuk mendaftar sebagai calon manajer Kampung Nelayan Merah Putih. Salah satu pertimbangannya adalah informasi awal mengenai penghasilan yang disebut berada di kisaran Rp12 juta hingga Rp15 juta.

"Awalnya kan digadang-gadang sampai Rp12 jutaan atau Rp15 jutaan. Jadi karena lihat itu, saya coba daftar. Kebetulan ada lokasi KNMP yang dekat juga dengan domisili saya," kata Mahsyar.

Ahmad dan Mahsyar sama-sama menjalani rangkaian seleksi mulai dari Computer Assisted Test (CAT), tes tertulis, hingga pelatihan sekitar 45 hari. Mahsyar mengikuti pelatihan di Surabaya, sedangkan Ahmad menjalani pelatihan di Jawa Barat. Selain materi pengelolaan koperasi, pelatihan juga mencakup latihan fisik dasar bergaya militer.

Masalah muncul setelah pelatihan

selesai. Para peserta kembali ke daerah masing-masing sambil menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Koperasi. SK tersebut nantinya menentukan lokasi penempatan sekaligus menjadi dasar kepastian hak yang diterima para manajer.

Peserta sebelumnya sempat mendapat informasi bahwa penandatanganan kontrak dilakukan pada 1 Agustus. Namun, jadwal itu berlalu tanpa kepastian. Informasi kemudian bergeser ke 20 Agustus, lalu 25 Agustus. Hingga 22 September, sebagian calon manajer masih belum memperoleh kepastian.

"Sampai sekarang belum ada kepastian," kata Ahmad.

Ketidakpastian itu menjadi persoalan bagi peserta yang telanjur meninggalkan pekerjaan lama. Mahsyar mengatakan sejumlah rekannya sebelumnya bekerja dengan penghasilan sekitar Rp4 juta per bulan. Setelah resign untuk mengikuti program tersebut, mereka kini kehilangan pemasukan tetap.

"Jadi teman-teman tuh jadi bingung, kan? Sudah jalan 3 bulan kok belum ada SK, sedangkan mereka sudah pada resign. Bahkan ada beberapa yang pinjam uang, gadaikan barang," kata Mahsyar.

Ia bahkan menceritakan ada peserta yang sudah berkeluarga dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seorang peserta pernah meminta bantuan untuk membeli popok anak. (qid,ist,kim/dya)



DONY OSKARIA
COO Danantara sekaligus
Kepala BP BUMN